

**PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL  
BAGI ANAK SEKOLAH DASAR  
Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi**

**Abstrak**

Kekerasan terjadi dimana-mana, salah satu peristiwa yang diekspose oleh media masa terjadi di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangore Jawa Barat. Dengan meninggalnya seorang praja bernama Clief Muntu berasal dari Manado akibat penganiayaan, terkuaklah kekerasan dan pembunuhan di sekolah tinggi tersebut. Lebih dari 34 praja yang mati karena sakit atau akibat kekerasan sejak berdirinya IPDN, suatu angka fantastis para calon birokrat sebagai pelindung masyarakat justru melakukan kekerasan terhadap sesamanya.

Peristiwa di atas jika diruntut secara saksama karena roh pendidikan bagi dosen-dosen atau pembina di IPDN untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian bangsa telah mengalami degradasi sehingga menghasilkan praja-praja yang brutal. Namun bila dilihat secara **menyeluruh dan utuh**, kekerasan, KKN yang menggurita, kerusakan lingkungan hidup, *kleptokrasi*, krisis total, kemiskinan, kerusakan masif, rendahnya mutu pendidikan, semuanya itu bersumber pada **rusaknya moral bangsa**

Pendapat lain dikemukakan Umar Said bahwa kerusakan moral bangsa Indonesia sudah mencapai titik puncak. Baik itu korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sipil dan militer, kalangan pemerintah dan swasta. Korupsi tidak dapat dibantas karena tidak adanya penegakkan hukum. Penegakan hukum tidak bisa dibereskan akibat dari kondisi politik, dan kondisi politik tidak kondusif karena akibat moral. Akibat **kondisi moral yang bobrok**, menyebabkan kerusakan di segala bidang, semua ini bermula sudah lama sejak jaman Orde Baru (Umar Said, 2007, Google Pendidikan Moral; 2). Oleh karena itu solusi yang paling utama adalah memberikan **pendidikan moral** khususnya bagi anak sekolah dasar, sehingga menghasilkan warga negara *excellent*, dengan parameter memiliki loyalitas tinggi terhadap negara bangsa, dan **moral yang baik** sehingga segala persoalan bangsa dapat diatasi.

**Kata kunci: Pendidikan moral**

**Pendahuluan**

Pendidikan bertujuan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas otaknya dan trampil dalam melaksanakan tugas, namun diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki moral, sehingga menghasilkan warga negara *excellent*. Oleh karena itu pendidikan tidak semata-mata mentrasfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan transfer moral bersifat universal, diharapkan peserta didik dapat menghargai

kehidupan orang lain tercermin dalam tingkah laku serta aktualisasi diri, semenjak usia SD hingga kelak dewasa menjadi warga negara yang baik (good citizen).

Dalam kenyataannya manusia Indonesia (khususnya anak-anak remaja) di saat ini, kurang memperhatikan moral yang tercermin dari perilaku tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti terjadi tawuran remaja, kurang menghormati orang tua, kurang mentaati norma-norma keluarga, hidup tidak disiplin. Terlebih pada masa globalisasi manusia Indonesia cenderung berperilaku keras, cepat, akseleratif dalam menyelesaikan sesuatu, dan budaya instan. Manusia dipaksa hidup seperti robot, selalu berada pada persaingan tinggi (konflik) dengan sesamanya, hidup bagaikan roda berputar cepat, yang membuat manusia mengalami disorientasi meninggalkan norma-norma universal, menggunakan konsep *Machiavelli* (menghalalkan segala cara), mementingkan diri sendiri dan **tidak memiliki moral yang baik**, tidak menghargai, mengasihi dan mencitai sesamanya (Haedar Nashir, 2007: 1).

Kebobrokan moral bangsa diawali oleh pemimpin-pemimpinnya sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Sahetape, SH., imiritus guru besar Universitas Erlangga. Surabaya yang mengatakan bahwa “pembusukan bangsa ini bagaikan ikan yang rusak berawal dari kepalanya” (Wawancara. Agustus 2003). Pemimpin bangsa saat ini sudah tidak dapat diharapkan, isu-isu Undang-undang 37 Tahun 2006 dan direvisi menjadi UU No. 21 Tahun 2006, pada hakekatnya adalah kolusi antara eksekutif dan yudikatif untuk merampok uang rakyat demi kepentingan diri sendiri. Para pemimpin negara pada hakekatnya tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, melayani masyarakat sebaik-baiknya, namun justru haus kekuasaan dan haus materi untuk memuaskan diri (Kedualahatan rakyat, Jum’at, 23 Maret 2007).

Banyak para pakar ilmu politik, pakar ilmu ekonomi, pakar lingkungan hidup, pakar kependudukan, rohaniawan, pakar HAM, pemimpin non formal, pakar moral memberi *warning* atau peringatan keras pada pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) agar *cekat-ceket* dalam menghadapi krisis total khususnya **krisis moral dan penegakkan hukum**, namun justru terlalu berhati-hati hanya mencari aman sampai menunggu akhir jabatannya. Presiden SBY merupakan figur pemimpin yang tidak memiliki integritas tinggi, dan didikasi tinggi untuk berani membangun moral bangsa demi kebaikan generasi penerus di masa datang. Sebagai contoh khusus pelanggaran HAM di Indonesia, presiden bersama-sama sebagian besar anggota DPR RI menolak dibentuknya Panitia *Ad Hoc* untuk pengusutan Pelanggaran HAM karena desakan razim yang masih berkuasa sejak zaman Orde Baru. Pembrantasan korupsi masih terkesan tebang pilih tidak mau membongkar sampai ke akar-akarnya, proyek-proyek pemerintah terkesan legal formal, dan kebocoran uang negara terjadi dimana-mana termasuk di dunia pendidikan perguruan tinggi, **lebih sepertiga** uang proyek pemerintah dikorupsi oleh birokrasi (Sunarso, 20 Maret 2007).

Dengan diberikannya pendidikan moral bagi anak SD diharapkan dapat merubah perilaku anak, sehingga peserta didik jika sudah dewasa lebih bertanggung jawab dan menghargai sesamanya dan mampu menghadapi tantangan jaman yang cepat berubah. Disinilah pentingnya **nilai-nilai moral** yang berfungsi sebagai media transformasi manusia Indonesia agar lebih baik, memiliki keunggulan dan kecerdasan di berbagai bidang; baik kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestika, kecerdasan logis, musikal, linguistik, kecerdasan Spesial (Habibah, 2007: 1). Peran orang tua (guru) hanya sebatas memberi **hal terbaik** sesuai dengan

jiwa jaman yang sedang dihadapi saat ini, agar kelak peserta didik (anak-anak SD) bagaikan anak panah lepas dari busurnya menentang, mengatasi permasalahannya sendiri, namun memiliki **keunggulan moral** yang baik dan luhur.

### **Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar**

Usia sekolah dasar (sekitar umur 6,00 – 12.00 tahun), ini merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang peserta didik, bahkan suatu hal yang fundamental bagi keberhasilan perkembangan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu seorang guru tidak boleh mengabaikan kehadiran anak usia sekolah dasar, demi kepentingan di masa depan bagi generasi penerus. Seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, arti pentingnya belajar bagi peserta didik, tujuan belajar bagi peserta didik, dan kegiatan belajar bagi anak SD, termasuk di dalamnya guru harus menguasai psikologi pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Sri Rumini, 1995: 15). Bagi seorang guru harus mengetahui perkembangan dan karakteristik peserta didik yang meliputi:

- “1. Mereka (anak usia SD) secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri.
2. Anak usia sekolah dasar senang bermain dan lebih suka bergembira
3. Anak SD suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi sesuatu situasi dan mencobakan hal-hal yang baru.
4. Anak SD bisa tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan-kegagalan.
5. Mereka (anak usia SD) belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi.
6. Anak SD belajar dengan cara bekerja, mengobserasi, berinisiatif dan mengajar anak-anak lainnya” (Mulyani Sumantri, 199: 17).

Menurut Slamet Suyanto mengatakan bahwa pendidikan SD merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; Pendidikan anak khusus usia 6-12 tahun, Psikologi

perkembangan anak, Biologi perkembangan, *Neuroscience*, Pendidikan jasmani, Pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang studi termasuk pendidikan moral (Slamet Suyanto, 2006: 1). Sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar antara lain; *Appropriate* yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau *integrated*, bermakna, *long life skills* dan fleksibel

Anak sekolah dasar mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan **moralnya** yang bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan berbudi pekerti luhur (bermoral baik) pendidikan harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan sekolah dasar.

Keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan moral di China patut kita tiru. Pendidikan moral usia anak SD di China berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang lebih menekankan pada karakter akhlak (**implementasi moral**) melalui proses *knowing the good, loving the good, and acting the good*, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik, sehingga menghasilkan akhlak mulia (moral yang baik) bisa terukir menjadi *habit of the mind, habit of the hart, habit of the hands* (Google Pendidikan Moral, 2007: 1). Pendidikan moral memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia, sehingga tidak cocok hanya menekankan pada aspek kognitif saja, hal ini dapat membunuh karakter anak. Namun pendidikan moral bagi anak SD harus disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak, mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia; intelektual, karakter, estetika, dan fisik dan dalam

koridor pembelajaran moral yang menyenangkan (Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2003: 8).

Dalam usaha mentarsfer nilai-nilai moral dapat digunakan **pendekatan dan metode** pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak. Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan moral dapat digunakan pendekatan **indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru**. Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi keondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi kelas, dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran moral.

Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. Sedang pendekatan klasifikasi nilai, dengan cara penalaran dan ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih. Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku moral (Ambarwati, 2007: 1).

### **Pengertian moral**

Moral berasal dari bahasa latin *mores*, yang artinya adat istiadat, kebiasaan atau cara hidup. Kata *mores* mempunyai sinonim *mos, moris, manner mores* atau *manners, morals*. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib hati nurani yang membimbing tingkahlaku batin dalam hidup. Kata moral sama dengan istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani

*ethos*, yaitu suatu kebiasaan adat istiadat. Secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik dan buruk, yang diterima umum tentang sikap dan perbuatan. Pada hakekatnya moral adalah ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sedang etika lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan pada suatu profesi (Budi Istanto, 2007; 4). Namun ada pengertian lain etika mempelajari kebiasaan manusia yang telah disepakati bersama seperti; cara berpakaian, tatakrama. Dengan demikian keduanya mempunyai pengertian yang sama yaitu kebiasaan yang harus dipatuhi (Hendrowibowo, 2007: 84). Moral yaitu suatu ajaran-ajaran atau wejangan, patokan-patokan atau kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedang pengertian etika adalah suatu pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika mempunyai pengertian ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas (Kaelan, 2002001: 180).

Moral selalu mengacu pada baik buruk manusia, sehingga moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia. Norma moral dipakai sebagai tolok ukur segi kebaikan manusia. Menurut Magnis Suseno yang dikutip Hendrowibowo; moral adalah sikap hati yang terungkap dalam sikap lahiriah. Moralitas terjadi jika seseorang mengambil sikap yang baik, karena ia sadar akan tanggungjawabnya sebagai manusia. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik sesuai dengan nurani (Hendrowibowo, 2007: 85).

## Pendidikan Moral

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203: 7).

Dalam mensosialisasikan nilai **moral** perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan moral, dan seluruh masyarakat.

Sosialisasi Pendidikan moral harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan **moral** adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Sosialisasi pendidikan **moral** perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan **pendidikan moral**. Perhatian pendidikan moral harus berlangsung cukup lama (terus menerus), dan pembelajaran moral harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2005).

Pendidikan moral harus direncanakan secara matang oleh *stakeholders*, sebagai *think-tank*, baik para pakar **Pendidikan moral** seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Pendidikan **moral** ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Keberhasilan pendidikan **moral** dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang



memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang memiliki moral luhur dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*).

Dalam mewujudkan kehidupan moral bagi anak usia dini perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politis, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui kurikulum pendidikan anak SD. Melalui lembaga pendidikan formal aspirasi masyarakat tentang **moral** dapat disalurkan, dan nilai-nilai moral dapat diperjuangkan sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah khususnya Depdikbud. Input dari masyarakat kepada pemerintah akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya **moral** bagi anak-anak SD yang didukung dana dari pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar Pendidikan **moral** dimasukkan dalam muatan lokal dan didanai oleh Pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan semakin merosotnya kehidupan moral terutama di kalangan anak muda (Kompas, 15 Maret 2007: I). Sementara secara **kultural** memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa yang berbasis nilai-nilai **moral** melalui penghormatan kepada orang tua dan bersumber dari nilai moral, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan, menjunjung nilai-nilai **moral**, disemaikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai moral diperlukan guru, pejuang moral yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustrasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan harus berhadapan dengan keadaan destruktif. Dengan

tidak jemu-jemunya meneriakkan sosialisasi pendidikan moral untuk mewujudkan nilai moral secara universal yang menghargai orang lain.

Guru harus bersedia bersinergis dengan orang tua anak didik untuk mewujudkan kehidupan moral yang baik dengan menggunakan konsep *gold three angle* yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi mengadakan R dan D (*research & development*) dalam bidang pendidikan moral yang telah diuji cobakan dan berhasil. Depdikbud termasuk Pejabat Kanwil Depdikbud memberi *good will* (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai moral. Penyandang dana bisa dari *grand* (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai moral sehingga pendidikan moral bisa berjalan dengan baik seperti harapan.

Hasil penelitian perguruan tinggi tentang **moral** diharapkan menambah alternatif pemerintah, yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan memecahkan **persoalan moral**. Mereka bisa bersinergis dan tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi (khususnya pakar moral) dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk **memperbaiki moral** peserta didik (Victor Purba, Kompas, Kamis, 22 Maret 2007; 12).

Jadi nilai moral dibawa seorang guru yang meyakini kebenaran moral sebagai ideologi ideal dan harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) khususnya anak SD agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang menjunjung nilai-nilai moral dapat terwujud.

Dengan adanya benih nilai-nilai **nilai moral** yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai moral dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai moral yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi anak-anak usia SD untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan moral dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*.

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dapat digunakan konsep "*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*" Konsep **pendidikan moral** bagi anak-anak usia SD di atas tidak hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan budi pekerti bisa mewujudkan masyarakat ideal seperti yang dicita-citakan.

### **Pentingnya Sosialisasi nilai-nilai moral**

Dalam usaha mensosialisasikan nilai-nilai moral peserta didik sering mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan bagaimana harus berpikir, berkeyakinan dan bertindak laku sebab apa yang dimengerti belum tentu sama dengan apa yang terjadi dalam masyarakat yang penuh konflik nilai. Televisi dan koran memberikan informasi yang berbeda dengan apa yang ada dalam keluarga maupun yang terjadi di masyarakat, sehingga hal ini sangat membingungkan peserta didik untuk menentukan pilihan nilai. Peserta didik sulit menentukan pilihan nilai yang terbaik, akibat dari tekanan dan propaganda teman sebaya. Dalam hal ini jika pendidikan nilai

**moral** ingin berhasil perlu mengajarkan secara langsung kepada anak didik dengan memberi keteladanan yang nyata. (Parjono, 2005: 1).

Transfer nilai moral kepada anak SD juga dapat digunakan dengan metode secara moderat karena di dunia ini tidak ada sistem yang sempurna, oleh karena itu peserta didik harus mengolah dan memiliki normanya sendiri. Guru dan orang tua hanya memberikan norma-norma yang sudah dibakukan dan mengajarkannya, sehingga peserta didik tidak merasa disitir dan digurui, mereka dibiarkan untuk bereksprimen, berdialog dengan dirinya atau merenungkan ajaran moral yang telah diterimanya, sehingga peserta didik menemukan apa yang dikehendakinya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai substansial.

Cara lain untuk memindahkan nilai budi pekerti dengan cara memodelkan, dengan asumsi bahwa guru (*panutan*) menampilkan diri dengan nilai tertentu sebagai model yang mengesankan, maka harapannya generasi muda akan meniru model yang diideolakan. Namun demikian model-model tingkah laku dan sikap yang berhubungan dengan nilai moral sering ditampilkan oleh banyak orang yang berbeda-beda sehingga anak bisa mengalami kebingungan dalam menentukan nilai moral. Oleh karena itu orang dewasa harus mengajar nilai-nilai moral secara berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya pada waktu dirumah, dalam perjalanan, waktu ditempat tidur dan pada waktu bangun pagi. Ajaran moral harus diikatkan sebagai tanda pada tangan dan dahi, dan menuliskan pada tiang pintu dan pintu gerbang. Atau seluruh kehidupan dan aktivitas serta lingkungan hidup dijadikan media untuk sosialisasi nilai-nilai moral (LAI, 2003: 200.).

Prinsip pembelajaran moral merupakan pembelajaran yang efektif yang harus menempatkan peserta didik sebagai pelaku moral yang *das sollen*, mereka harus diberi kesempatan untuk belajar secara aktif baik fisik maupun mental. Aktif secara mental bila peserta didik aktif berfikir dengan menggunakan pengetahuannya untuk mempersepsikan pengalaman yang baru disamping secara fisik dapat diamati keterlibatannya dalam belajar sehingga nilai-nilai moral menjadi bagian dari hidupnya.

Dalam pembelajaran nilai moral ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran nilai dapat efektif yaitu perbuatan dan pembiasaan. Oleh karena dengan perbuatan anak SD (peserta didik) dapat secara langsung melakukan pengulangan perbuatan agar menjadi kebiasaan. Atau nilai moral yang baik menjadi budaya mereka.

Interaksi antara panutan yang memberi keteladanan pada peserta didik dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran nilai moral sangat menguntungkan untuk transfer nilai melalui saling membagi dalam pengalaman. Guru yang baik juga dapat mengerti perasaan, pemahaman, jalan pikiran peserta didik dan mereka diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan sekaligus dapat memberi jalan keluar dalam pergumulan pemilihan nilai budi pekerti yang ada tanpa mengindoktrinasi.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran nilai, peserta didik dapat memilih berbagai alternatif nilai yang ada dan mengamalkan sebagai ujud aktualisasi diri. Guru sebagai panutan yang memberi hidupnya bagi peserta didik diharapkan dapat merefleksikan diri melalui perasaan dan pikirannya setelah merenung dan mendapat masukan sehingga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengamalan nilai budi pekerti yang telah diterima dan dilakukan siswanya.

Ada dua lembaga yang berperan mengajarkan pendidikan budi pekerti yaitu lembaga formal dan non formal, secara formal pendidikan moral dilakukan oleh sekolah dan non formal oleh keluarga dan masyarakat. Pendidikan moral melalui keluarga, peran orang tua sangat dominan dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak usia dini sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak. Anak-anak akan patuh pada perintah orang tuanya untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan pendidikan moral melalui masyarakat biasanya berupa norma sosial. Norma merupakan kaidah, aturan yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi warganya, agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib. Ada beberapa norma yang harus dipatuhi dalam masyarakat antara lain; norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Norma di atas sangat membantu untuk mewujudkan **moral** yang baik.

Pendidikan moral di sekolah dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk membentuk peserta didik memiliki moral yang luhur, berakhlak mulia, agar kelak berguna bagi bangsa dan negara. Program pendidikan moral diwujudkan terintegrasi dalam semua pelajaran yang ada, agar menghasilkan warga negara yang baik (Romi Taofeqoh, 2007; 5)

## **Penutup**

Pendidikan moral akan berhasil apabila, guru memberi stimulus agar anak didik memberi respon sesuai dengan keinginan pendidik, dan dengan stimulus, respon itu anak didik diberi *classical conditioning* untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Agar tujuan pendidikan moral dapat tercapai, guru dapat memberi hadiah kepada anak didik yang berhasil dan hukuman bagi yang gagal, namun dalam koridor

memanusiakan manusia. Proses stimulus dan respon dalam pendidikan moral harus diberikan terus menerus dan terprogram, sehingga anak SD akan memiliki *habitus* (pendidikan yang merubah perilaku) dalam mewujudkan manusia Indonesia yang bermoral.

Dalam melaksanakan pendidikan bermoral untuk mewujudkan anak SD yang ideal, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas peserta didik untuk membuat mereka sadar akan keberadaannya di dunia ini. Prinsip humanisme harus dijunjung secara otentik, bukan humanitarian. Prinsip humanisme yang ada dalam UU Sisdiknas adalah untuk mencapai manusia bermoral, bermartabat, berbudi pekerti luhur.

Pendidikan moral diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial, aturan hukum dan nilai-nilai moral demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai budi pekerti dan moral bangsa.

Arah kebijaksanaan pendidikan moral adalah untuk mewujudkan masyarakat sipil dengan parameter masyarakat lebih baik; demokratis, anti kekerasan, berbudi pekerti luhur, bermoral; masyarakat mendapat porsi partisipasi lebih luas, serta adanya landasan kepastian hukum, mengedepankan nilai-nilai egalitarian, nilai keadilan, menghargai HAM, penegakan hukum, menghargai perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dengan dilandasi pengamalan nilai-nilai moral Pancasila, yang diaktualisasikan baik secara obyektif dan sobyektif sebagai

paradigmanya. Pendidikan moral harus menjadi bagian hidup dalam kehidupan sehari-hari akan sangat mendukung suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan moral mewujudkan Indonesia baru yang lebih ideal (*Beautiful Cauntry* artinya negeri yang indah, tanpa kekerasan, dan masyarakatnya hidup dalam kedamaian, ***gemah ripah loh jinawi, tata tertrem karta raharjo***, dalam koridor *Civil Society*)

Diberikannya pendidikan moral pada anak SD merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi kenakalan remaja, sex bebas, pornografi, kekerasan, KKN. Dengan tersosialisasikan pendidikan moral diharapkan peserta didik dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi bangsa, dan dapat membangun kehidupan budi pekerti luhur dan moral bangsa secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai budi pekerti dan moral bangsa sehingga cita-cita bangsa dan tujuan nasional bisa tercapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati, dkk. *Pendekatan dan Metode Pengembangan Moral Anak Usia Dini*. Yogyakarta; FIP UNY. (makalah).
- Budi Istanto, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus*. Yogyakarta: FIP. UNY.
- Habibah, dkk. 2007. *Metode Pengembangan Moral Anak Pra Sekolah*. Yogyakarta: FIP UNY. (makalah).
- Hendrowibow, I. 2007. "Pendidikan Moral", Majalah *Dinamika*, FIP, UNY.
- LAI, 2003, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Kaelan, 2001. *Pendidikan Moral Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Parjono. 2005. *Pendidikan Nilai-nilai Moral*. Yogyakarta: MKU, UNY.
- Romi Toufiqoh, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral*, Yogyakarta: FBS, UNY.



Slamet Suyanto, 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdikbud, Dirjendikti. Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi.

-----, 2006. "Prinsip Pembelajaran Anak Usia Dini", *Disampaikan pada Saresehan Pengembangan Pembelajaran di SD dan TK Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar FIP*. Puslit PAUD UNY.

Setyo Raharjo, 2005. *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: FIP, UNY.

Sofia Hartati. 2005. *Perekembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Dirjendikti Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

Sri Rumini, dkk. 1995. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sunarso, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegara*, Yogyakarta: UPT MKU UNY

Umar Said, 2007. *Google Pendidikan Moral*.

### **Surat Kabar**

Haedhar Nashir, "Leptop Dewan". *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 23 Maret 2007.

Purnomo, "IPDN Bukan Pusat Pelatihan Binatang", *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2007.

Redaktor, "Tajuk Rencana", *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2007.

Sri Sultan Hamengkubuwono X, "Budi Pekerti Masuk Muatan Lokal", *Kompas*, 15 Maret 2007.

Victor Purba, "UI Siap Melangkah Lebih Kongkrit", *Kompas*, Jakarta, 23 Maret 2007

### **Biodata Penulis:**

Sigit Dwi Kusrahmadi, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1957, menyelesaikan S-1 di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, dan menyelesaikan S-2 Sospol Ketahanan Nasional UGM. Sejak tahun 1987 mengajar di MKU dan tahun 2003 pindah di D-2 PGSD (PDPS) FIP UNY.